

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling nyata dan kompleks di dunia kontemporer. Setelah Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, kondisi sosial dan politik perempuan mengalami kemunduran drastis. Taliban melarang anak perempuan untuk bersekolah setelah usia tertentu, membatasi keterlibatan mereka dalam ruang publik, serta mempersempit akses terhadap pekerjaan yang layak. Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan Afghanistan tidak hanya menghadapi hambatan budaya, tetapi juga tekanan struktural dan politik yang sistematis (Tempo.co, 2023; AP News, 2025). Peraturan diskriminatif ini mencerminkan ketidakpedulian rezim terhadap hak-hak dasar perempuan dan menegaskan bahwa kondisi tersebut adalah pelanggaran serius terhadap prinsip universal hak asasi manusia. Situasi ini diperparah oleh tingginya tingkat buta huruf di Afghanistan yang pada tahun 2022 tercatat hanya 37,3% dengan kesenjangan signifikan antara laki-laki (52,1%) dan perempuan (22,6%) (UNESCO, 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan sebagai hak dasar manusia masih jauh dari jangkauan mayoritas perempuan Afghanistan.

Dalam konteks ini, peran organisasi internasional menjadi sangat penting, terutama UN Women yang sejak berdiri pada tahun 2010 telah berfokus pada upaya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di seluruh dunia. UN Women hadir di Afghanistan melalui kerja sama dengan pemerintah, lembaga lokal, serta mitra internasional untuk mengatasi hambatan struktural dan sosial yang menghalangi akses perempuan terhadap pendidikan (UN Women, Gender Country Profile, 2024). Bentuk konkret dari keterlibatan UN Women terlihat pada penyediaan bantuan teknis, pembangunan fasilitas pendidikan yang ramah gender, pelatihan guru perempuan, hingga advokasi kebijakan yang menjamin hak pendidikan bagi semua. Pendekatan ini menunjukkan bahwa upaya memperjuangkan kesetaraan gender tidak hanya

terbatas pada aspek advokasi normatif, tetapi juga diwujudkan dalam program nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat perempuan Afghanistan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki justifikasi yang kuat: diskriminasi yang dialami perempuan Afghanistan bukan hanya masalah domestik, melainkan juga tantangan internasional yang menyangkut nilai-nilai HAM dan pembangunan berkelanjutan.

Signifikansi penelitian ini dapat dilihat dari tiga dimensi utama, yaitu akademis, praktis, dan sosial. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai teori hak asasi manusia, feminisme, dan organisasi internasional dengan menghubungkannya pada kasus nyata diskriminasi gender di Afghanistan. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana norma-norma internasional, seperti prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan, berinteraksi dengan realitas politik yang represif. Secara praktis, penelitian ini penting bagi pembuat kebijakan, lembaga internasional, maupun masyarakat sipil yang tengah berupaya merumuskan strategi dalam memperluas akses pendidikan bagi perempuan di negara-negara dengan kondisi politik yang tidak stabil. Informasi mengenai program-program UN Women, misalnya melalui **UN Women Strategic Plan 2022–2025** dan **Gender Equality Accelerators**, memberikan gambaran nyata bagaimana standar global dapat diterjemahkan menjadi kebijakan lokal yang responsif gender (UN Women Strategic Plan, 2022–2025). Secara sosial, penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama bagi pemberdayaan perempuan. Dengan pendidikan, perempuan Afghanistan tidak hanya memperoleh keterampilan, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan status sosial, kemandirian ekonomi, serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi (UNESCO Core Data Portal, 2024).

Lebih lanjut, penelitian ini memiliki makna penting bagi komunitas internasional yang selama ini menaruh perhatian besar terhadap kondisi perempuan Afghanistan. PBB bahkan menegaskan bahwa Afghanistan merupakan negara paling represif terhadap perempuan sejak dikuasai kembali oleh Taliban (France24, 2024). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga relevansi global karena menyangkut kepatuhan terhadap instrumen internasional, termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

serta agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 5 mengenai kesetaraan gender. Dalam konteks teori feminisme, penelitian ini menunjukkan bagaimana perempuan Afghanistan tidak sekadar menjadi korban, tetapi juga subjek yang memiliki hak dan kapasitas untuk memperoleh pendidikan serta berkontribusi pada pembangunan masyarakatnya.

Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisisnya terhadap **partisipasi UN Women dalam menanggulangi pembatasan hak perempuan di Afghanistan tahun 2023–2024**, dengan menitikberatkan pada sektor pendidikan. Banyak penelitian sebelumnya membahas diskriminasi perempuan Afghanistan secara umum atau sekadar menyoroti kebijakan Taliban, namun penelitian ini secara khusus menelaah bagaimana **strategi global UN Women—melalui Gender Equality Accelerators—diterapkan dalam konteks Afghanistan** yang penuh keterbatasan. Misalnya, kerja sama UN Women dengan UNESCO dalam program literasi bagi perempuan dan remaja putri di daerah terpencil tidak hanya memberikan akses pendidikan dasar, tetapi juga menghubungkan mereka dengan jaringan dukungan sosial, ekonomi, dan emosional (UNESCO Core Data Portal, 2024). Hal ini menunjukkan dimensi baru dalam studi organisasi internasional: bagaimana aktor global mampu mengadaptasi standar dan program internasional ke dalam situasi lokal yang sangat represif dan penuh risiko politik.

Kebaruan lain dari penelitian ini adalah analisis kritis terhadap kesesuaian antara strategi global UN Women dengan implementasi di tingkat lokal Afghanistan. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas intervensi internasional. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan peran UN Women sebagai organisasi advokasi, tetapi juga menilai keberhasilan maupun tantangan program-program yang diimplementasikan, misalnya terkait keterbatasan akses di daerah pedesaan, resistensi budaya, serta tekanan dari kebijakan Taliban yang membatasi ruang gerak perempuan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih tajam dibanding penelitian lain yang sering berhenti pada tataran normatif tanpa melihat realitas implementasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa perjuangan perempuan Afghanistan untuk mendapatkan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari dukungan aktor internasional seperti UN Women. Justifikasi penelitian berangkat dari kondisi diskriminatif yang nyata, signifikansi penelitian tercermin dari kontribusinya bagi teori dan praktik, sementara novelty penelitian terletak pada analisis fokus terhadap strategi UN Women dalam konteks politik yang represif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademis dan praktis untuk memahami bagaimana intervensi organisasi internasional dapat memengaruhi situasi perempuan di negara-negara yang hak asasi manusianya terancam.

## 1.2 Rumusan masalah

Kembalinya Taliban sebagai penguasa de facto di Afghanistan pada Agustus 2021 menandai dimulainya kembali serangkaian kebijakan yang mengekang hak-hak dasar perempuan khususnya dalam bidang pendidikan. Sejak saat itu hingga tahun 2024, perempuan Afghanistan menghadapi pembatasan yang semakin sistematis dan menyeluruh, mulai dari pelarangan sekolah menengah dan universitas, larangan bekerja di organisasi non-pemerintah, hingga pembatasan mobilitas dan keterlibatan dalam ruang publik. Kebijakan tersebut mencerminkan bentuk diskriminasi struktural yang tidak hanya memberikan dampak negatif pada kehidupan individu perempuan, tetapi juga mengganggu stabilitas dan keberlanjutan tatanan sosial secara menyeluruh.

Dengan menyingkirkan perempuan dari akses terhadap pendidikan dan ruang partisipasi publik, kebijakan ini secara langsung menghambat kontribusi perempuan dalam proses pembangunan nasional serta memperkuat ketimpangan gender yang sistemik. Diskriminasi yang berlangsung tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang diatur dalam instrumen internasional seperti di UDHR dan CEDAW, pelanggaran ini tampak dalam pembatasan akses terhadap pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap individu tanpa memandang jenis kelamin.

Melalui perspektif teori Feminisme, tindakan Taliban terhadap pembatasan akses pendidikan bagi perempuan dapat dipahami sebagai manifestasi dari sistem patriarki yang dilembagakan melalui struktur politik dan budaya sistem ini mereproduksi relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan secara sistematis diposisikan dalam posisi subordinat baik dalam ranah sosial, ekonomi, maupun hukum. Sementara itu, peran organisasi internasional seperti UN Women menjadi krusial dalam merespons situasi ini berdasarkan teori Organisasi Internasional, UN Women tidak hanya memiliki legitimasi moral dan hukum untuk bertindak tetapi juga memegang fungsi normatif dalam menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

UN Women berupaya memberikan advokasi global, dukungan teknis, serta perlindungan terhadap perempuan Afghanistan di tengah rezim yang represif dengan demikian fokus penelitian ini tertuju pada analisis mendalam terhadap praktik diskriminasi yang berlangsung di Afghanistan sejak tahun 2023 hingga 2024, dengan menelaah tindakan-tindakan tersebut melanggar prinsip hak asasi manusia, memperkuat sistem patriarki melalui kacamata feminisme, serta menempatkan UN Women sebagai aktor internasional dalam mendukung pemulihan hak-hak perempuan Afghanistan.

### **1.3 Pertanyaan penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini diarahkan untuk memahami secara mendalam dinamika peran organisasi internasional dalam merespons pembatasan hak perempuan yang diberlakukan oleh rezim Taliban di Afghanistan, khususnya sepanjang tahun 2023 sampai 2024. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana UN Women sebagai salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki mandat khusus dalam isu kesetaraan gender, berupaya menjalankan program-program pemberdayaan di tengah kondisi sosial-politik yang represif.

Untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian, maka dirumuskan sejumlah fokus kajian yang bertujuan menggambarkan bentuk intervensi UN Women.

- A. Bagaimana peran UN Women dalam membantu perempuan Afghanistan yang terdampak kebijakan pembatasan Taliban pada tahun 2023 sampai 2024?
- B. Pembatasan apa saja yang dilakukan oleh Taliban untuk perempuan di Afghanistan di bidang pendidikan ?
- C. Apa tantangan utama yang di hadapi oleh UN Women dalam menjalankan program-programnya untuk perempuan Afghanistan pada tahun 2023 sampai 2024, dan bagaimana mereka mengatasi tantangan tersebut?

#### **1.4 Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran UN Women sebagai organisasi internasional yang memiliki peran khusus dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan hak perempuan, khususnya dalam konteks Afghanistan pada periode tahun 2023 hingga 2024. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada bagaimana UN Women menjalankan fungsi advokasi, koordinasi program, dan pemberdayaan perempuan di tengah kebijakan pembatasan yang diterapkan oleh pemerintahan Taliban terhadap akses pendidikan bagi perempuan. Melalui pendekatan ini, penelitian hendak mengungkap strategi serta bentuk-bentuk intervensi konkret yang dilakukan oleh UN Women untuk mempertahankan dan memperluas ruang pendidikan bagi perempuan di Afghanistan termasuk melalui kerja sama dengan organisasi lokal dan internasional, penyediaan bantuan teknis, serta dukungan moral dan politis kepada kelompok perempuan terdampak.

Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kemajuan atau perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah de facto dan de jure Afghanistan dalam merespons tekanan internasional terkait hak pendidikan perempuan. Fokus ini penting untuk menilai apakah terdapat tanda-tanda pelanggaran atau resistensi terhadap upaya global dalam

memperjuangkan hak-hak dasar perempuan, terutama di bidang pendidikan. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek kebijakan formal pemerintah, tetapi juga menelaah bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam praktik di berbagai wilayah, serta bagaimana reaksi masyarakat, institusi lokal, dan komunitas pendidikan terhadap kebijakan tersebut.

### **1.5 Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dalam memahami dan menjelaskan peran organisasi internasional khususnya UN Women dalam merespons pelanggaran hak-hak perempuan di Afghanistan, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan.

Di tengah dinamika kebijakan represif yang diberlakukan oleh pemerintahan Taliban sejak tahun 2021 dan terus berlanjut hingga tahun 2024, penelitian ini berupaya menyajikan analisis yang tidak hanya deskriptif tetapi juga teoritis berdasarkan pendekatan ilmu hubungan internasional dan studi gender secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan pemahaman dalam studi hubungan internasional dengan menerapkan teori Organisasi Internasional, teori Hak Asasi Manusia, dan teori Feminisme dengan menggunakan teori Organisasi Internasional penelitian ini menunjukkan bagaimana UN Women, sebagai bagian dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa berfungsi tidak hanya sebagai aktor normatif tetapi juga sebagai agen pelaksana yang mampu menjalankan program-program strategis di tengah kondisi politik yang represif. Penelitian ini juga menunjukkan keterbatasan dan tantangan nyata yang dihadapi organisasi internasional ketika beroperasi di negara yang tidak memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip universal.

Melalui teori Hak Asasi Manusia, penelitian ini menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan adalah hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Dengan demikian, segala bentuk pelarangan atau pembatasan terhadap pendidikan

perempuan di Afghanistan merupakan bentuk nyata dari pelanggaran HAM penelitian ini mengaitkan pelanggaran tersebut dengan kewajiban komunitas internasional, termasuk UN Women untuk mendorong pemenuhan hak-hak dasar di negara-negara yang melanggarnya.

Sementara itu, teori Feminisme menjadi landasan penting dalam memahami bahwa diskriminasi yang dialami perempuan Afghanistan bukan hanya akibat kebijakan negara semata, tetapi juga merupakan bagian dari sistem yang tertanam secara struktural dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan pendidikan perempuan adalah bentuk dari subordinasi gender yang dilembagakan oleh negara, dan perlawanan terhadapnya membutuhkan pendekatan yang bersifat struktural dan transformatif dengan demikian, penelitian ini memperkuat posisi teori feminisme sebagai alat analisis kritis terhadap ketimpangan relasi kuasa berbasis gender, terutama dalam konteks konflik dan rezim otoriter. Bagi kalangan akademik, penelitian ini dapat memperluas literatur dan mendorong kajian-kajian lanjutan mengenai isu perempuan, pendidikan, dan hubungan internasional dari sudut pandang kritis dan interdisipliner.